

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, komunikasi antarpegawai merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan dan pelayanan publik. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Kontrak (ASN PPPK) sebagai bagian dari sistem kepegawaian instansi membawa dinamika tersendiri bagi organisasi. ASN PPPK memiliki peran strategis yang relatif serupa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas administratif dan teknis di sektor pendidikan. Namun, perbedaan status pegawai, masa kerja berbasis kontrak, dan peluang pengembangan karier menempatkan ASN PPPK pada posisi unik dalam struktur birokrasi.

Perbedaan status ini berpotensi memengaruhi bagaimana ASN PPPK berkomunikasi dan membangun hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan rekan PNS. Dalam praktik sehari-hari, ASN PPPK mungkin menghadapi tantangan komunikasi seperti keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, perasaan canggung dalam interaksi, dan tuntutan untuk beradaptasi dengan norma dan budaya komunikasi birokrasi yang telah lama ada. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi di tempat kerja tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang membentuk hubungan kerja, peran, dan identitas individu dalam organisasi.

Fenomena komunikasi dalam birokrasi pemerintahan bukanlah isu baru. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam organisasi pemerintahan memengaruhi efektivitas koordinasi kerja, kinerja karyawan, dan kualitas hubungan antar individu dan unit kerja. Penelitian di Dinas Kepegawaian Aceh, misalnya, mengungkapkan bahwa iklim komunikasi organisasi yang kondusif baik vertikal maupun horizontal dapat memfasilitasi penyampaian informasi dan mendukung kinerja karyawan. Studi lain juga telah mengkonfirmasi bahwa pola komunikasi birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Namun, sebagian besar penelitian ini berfokus pada komunikasi organisasi secara umum, kinerja karyawan, atau iklim komunikasi, dan belum secara khusus meneliti pola komunikasi Pegawai Negeri Sipil (ASN PPPK) dalam membangun hubungan kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Namun, ASN PPPK merupakan kelompok pegawai negeri sipil yang relatif baru dalam sistem layanan sipil nasional dan dituntut untuk beradaptasi dengan sistem komunikasi formal dan informal yang sudah mapan. Posisi ASN PPPK, yang berada di antara struktur birokrasi yang cenderung hierarkis dan kebutuhan untuk membangun hubungan interpersonal yang efektif, menjadikan pengalaman komunikasi mereka sebagai fenomena yang menarik dan penting untuk dipahami secara mendalam.

Konteks organisasi, sumber daya manusia merupakan aset kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Seperti yang dikemukakan

Tjutju (2008), betapapun canggihnya teknologi dan betapapun luasnya sumber daya keuangan yang dimiliki suatu organisasi, tanpa sumber daya manusia yang profesional, tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia, termasuk melalui proses pengadaan dan perekrutan, merupakan strategi penting bagi organisasi. Sejalan dengan itu Hasibuan (2016) menyatakan bahwa pengadaan yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan organisasi, sementara Siagian (2009) menekankan bahwa perekrutan merupakan proses strategis untuk memperoleh individu dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.

Sektor publik, pengadaan Aparatur Sipil Negara mengalami perubahan yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan sistem merit sebagai dasar dalam manajemen ASN. Sistem merit merupakan sistem pengelolaan aparatur yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, serta pengembangan karier pegawai, tanpa membedakan latar belakang politik, hubungan pribadi, maupun faktor nonprofesional lainnya.

Melalui penerapan sistem merit, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang profesional, adil, dan berbasis kompetensi, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerja yang dimiliki. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik dengan memastikan bahwa posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Undang-undang tersebut kemudian memperkenalkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, yang memiliki perbedaan status kepegawaian dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK merupakan pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi jabatan tertentu, baik jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi tertentu. Rekrutmen PPPK mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2019 dan diperluas pada tahun 2021, khususnya untuk formasi guru, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama.

Meskipun PPPK secara normatif memiliki hak dan kewajiban yang relatif sama dengan pegawai negeri sipil, perbedaan dalam keamanan karir dan status pekerjaan masih berpotensi memengaruhi pengalaman kerja mereka, termasuk dalam komunikasi dan hubungan kerja. Oleh karena itu, memahami pola komunikasi PPPK ASN sangat penting, tidak hanya untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga untuk memahami bagaimana makna dibentuk melalui interaksi sosial di tempat kerja.

Berdasarkan Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi pengalaman komunikasi ASN PPPK secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana ASN PPPK menafsirkan simbol, peran, dan interaksi sosial dalam hubungan kerja sehari-hari mereka. Teori interaksi simbolik,

dengan konsep utama *mind*, *self*, dan *society*, digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami bagaimana makna komunikasi dibangun melalui proses interaksi, bagaimana identitas ASN PPPK terbentuk dalam relasi kerja, serta bagaimana konteks sosial dan budaya birokrasi memengaruhi pola komunikasi yang terjadi.

1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pola interaksi simbolik ASN PPPK dalam menjalin relasi kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, yang dipahami melalui proses pemaknaan (*mind*), pembentukan konsep diri (*self*), dan pengaruh lingkungan sosial serta budaya birokrasi (*society*).

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana ASN PPPK memaknai simbol-simbol (*Mind*) komunikasi dalam menjalin relasi kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana ASN PPPK membentuk dan menampilkan konsep diri (*Self*) melalui pola komunikasi dalam menjalin relasi kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana lingkungan sosial dan budaya (*Society*) birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu membentuk pola komunikasi ASN PPPK dalam menjalin relasi kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana (*Mind*) ASN PPPK memaknai simbol-simbol komunikasi yang muncul dalam interaksi kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui bagaimana (*Self*) ASN PPPK membentuk dan menampilkan konsep diri melalui pola komunikasi dalam menjalin relasi kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui bagaimana (*Society*) lingkungan sosial dan budaya birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu membentuk pola komunikasi ASN PPPK dalam menjalin relasi kerja.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya komunikasi organisasi mengenai pola komunikasi ASN PPPK dalam menjalin relasi kerja di lingkungan pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead melalui konsep *mind*, *self*, dan *society* dalam interaksi komunikasi antara ASN PPPK dan ASN PNS.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, interaksi simbolik, dan relasi kerja di lingkungan instansi pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dalam memahami pola komunikasi ASN PPPK di lingkungan kerja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu ASN PPPK dalam membangun relasi kerja yang lebih efektif, baik dengan atasan maupun sesama pegawai.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang lebih harmonis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.